

DATA INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (INFORMASI RAHASIA/TIDAK UNTUK DIPUBLIKASIKAN)

No.	JENIS INFORMASI	DASAR HUKUM	Unit Kerja yang Menguasai Informasi	Penerbit Informasi	Waktu dan Tempat Pembuat	Format	Retensi
1.1	Kajian	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 39 ayat (3); <i>jo.</i> Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara.	Deputi Pencegahan Direktorat Kajian Kebijakan dan Advokasi	KPPU	Tahun berjalan, Jakarta	<i>softcopy website</i>	ketika kajian sedang berjalan
1.2	Evaluasi kebijakan	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 39 ayat (3); <i>jo.</i> Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara.	Deputi Pencegahan Direktorat Kajian Kebijakan dan Advokasi	KPPU	Tahun berjalan, Jakarta	<i>softcopy website</i>	ketika evaluasi kebijakan sedang berjalan
1.3	Hasil kajian atau evaluasi kebijakan yang belum menjadi dasar penyampaian saran dan rekomendasi	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 39 ayat (3); <i>jo.</i> Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara.	Deputi Pencegahan Direktorat Kajian Kebijakan dan Advokasi	KPPU	Tahun berjalan, Jakarta	softcopy website	setelah disampaikan saran dan rekomendasi
1.4	Proses dan hasil monitoring dan/atau penelitian dugaan pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 39 ayat (3); <i>jo.</i> Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara.	Deputi Pencegahan Direktorat Kajian Kebijakan dan Advokasi	KPPU	Tahun berjalan, Jakarta	-	ketika monitoring dan/atau penelitian sedang berjalan
1.5	Proses penilaian atas notifikasi penggabungan, peleburan dan pengambilalihan yang sedang berjalan	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 29; <i>jo.</i> Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha, dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.	Deputi Pencegahan Direktorat Merger	KPPU	Tahun berjalan, Jakarta	<i>hardcopy</i>	ketika proses penilaian sedang berjalan

DATA INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (INFORMASI RAHASIA/TIDAK UNTUK DIPUBLIKASIKAN)

No.	JENIS INFORMASI	DASAR HUKUM	Unit Kerja yang Menguasai Informasi	Penerbit Informasi	Waktu dan Tempat Pembuat	Format	Retensi
2.1	Identitas Pelapor	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 38 ayat (3).	Deputi Bidang Penegakan Hukum Direktorat Investigasi	-	Tahun berjalan, Jakarta	-	-
2.2	Kerahasiaan informasi yang dikategorikan sebagai rahasia perusahaan	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 38 ayat (3).	Deputi Bidang Penegakan Hukum Direktorat Investigasi	-	Tahun berjalan, Jakarta	-	-
2.3	Klarifikasi laporan dan inisiatif dugaan pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara.	Deputi Bidang Penegakan Hukum Direktorat Investigasi	-	Tahun berjalan, Jakarta	-	-
2.4	Proses dan hasil penyelidikan dugaan pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara.	Deputi Bidang Penegakan Hukum Direktorat Investigasi	-	Tahun berjalan, Jakarta	-	-
2.5	Proses dan hasil pemberkasan atas hasil penyelidikan dugaan pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara.	Deputi Bidang Penegakan Hukum Direktorat Penindakan	-	Tahun berjalan, Jakarta	-	-
2.6	Proses sidang musyawarah Majelis dalam pengambilan Putusan	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara.	Deputi Bidang Penegakan Hukum Direktorat Persidangan	-	Tahun berjalan, Jakarta	-	-

DATA INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (INFORMASI RAHASIA/TIDAK UNTUK DIPUBLIKASIKAN)

No.	JENIS INFORMASI	DASAR HUKUM	Unit Kerja yang Menguasai Informasi	Penerbit Informasi	Waktu dan Tempat Pembuat	Format	Retensi
3.1	Gaji yang diterima individu komisioner/pegawai	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 6 ayat (3) butir c.	Sekretariat Jenderal Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia	-	Tahun berjalan, Jakarta	-	-
3.2	Data pribadi individu komisioner/pegawai	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 6 ayat (3) butir c.	Sekretariat Jenderal Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia	-	Tahun berjalan, Jakarta	-	-
3,3	Hasil rapat internal KPPU dan termasuk di dalamnya rapat internal Sekretariat KPPU	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17.	Sekretariat Jenderal Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia	-	Tahun berjalan, Jakarta	-	-
3,4	Proses dan Hasil Audit yang dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) dan Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI)	-	Satuan Pengawas Internal	KPPU	Tahun berjalan, Jakarta	-	-
3,5	Surat dan Saran Pertimbangan KPPU kepada Pemerintah terkait Kebijakan Pemerintah	-	Direktur Pengkajian Kebijakan dan Advokasi	KPPU	Tahun berjalan, Jakarta	-	-